



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

PERTEMBAKAUAN TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perusahaan di bidang pertembakauan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan baku bagi industri hasil tembakau, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemasukan keuangan negara dan daerah, serta terjaganya kekayaan plasma nutfah tembakau di Jawa Timur;
 - b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi tembakau di Jawa Timur, perlu disusun arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan secara terencana, terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04.2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PERTEMBAKAUAN TAHUN 2022-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Arah . . .

5. Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan adalah dokumen perencanaan yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta evaluasi program Pertembakauan di Jawa Timur.
6. Tembakau adalah tanaman spesies *Nicotiana tabacum* L dan *Nicotiana rustica* L serta mengandung senyawa nikotin.
7. Pertembakauan adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengelolaan budi daya tembakau, industri hasil tembakau, dan pemasaran.
8. Perlindungan Pertembakauan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan tembakau mulai dari budi daya tembakau, industri tembakau sampai dengan pemasaran produk tembakau.
9. Pengembangan Pertembakauan adalah upaya meningkatkan kemampuan produksi dan produktivitas, nilai tambah serta pemasaran industri hasil tembakau.
10. Petani Tembakau adalah setiap orang yang melakukan usaha tani tembakau di Jawa Timur.
11. Hasil Tembakau adalah olahan tembakau yang sebagian atau seluruhnya dibuat dari bahan baku tembakau untuk keperluan industri hasil tembakau atau industri lainnya.
12. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah proses pengolahan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk rokok dan non rokok dengan berbahan baku utama tembakau melalui proses teknologi tertentu untuk menghasilkan nilai tambah.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

- (1) Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melindungi dan mengembangkan pertembakauan di Jawa Timur.

(2) Arah . . .

- (2) Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024 bertujuan untuk:
- a. memberikan gambaran terhadap kondisi eksisting dan potensi pengembangan pertembakauan Jawa Timur dalam mendukung perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pemasukan terhadap keuangan negara/daerah;
 - b. menentukan strategi dan kebijakan yang dapat dikembangkan untuk membangun kemandirian, daya saing, dan kelestarian pertembakauan yang berbasis budaya; dan
 - c. memberikan acuan perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah untuk perlindungan dan pengembangan pertembakauan tahun 2022-2024.

Pasal 3

- (1) Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan terdiri atas:
- a. melestarikan budi daya tembakau dan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, serta mengembangkan IHT berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan dan menjaga nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal masyarakat;
 - b. meningkatkan produksi dan produktivitas, serta kualitas tembakau sebagai substitusi tembakau impor;
 - c. membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Petani Tembakau, IHT, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjaga keberlanjutan usaha tani tembakau dan IHT di Indonesia dalam bentuk kemitraan;
 - d. meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh;
 - e. mempertahankan karakteristik khas dan kemurnian varietas tembakau (indikasi geografis) melalui penerapan inovasi dan teknologi serta penetapan regulasi tata niaga;
 - f. menyusun . . .

- f. menyusun peta jalan (*road map*) dan rencana strategis pertembakauan yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global;
 - g. mengembangkan, memanfaatkan, dan mempublikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif paparan asap rokok terhadap kesehatan;
 - h. menginventarisasi dan mengevaluasi regulasi yang menghambat keberlangsungan budi daya tembakau dan IHT;
 - i. membangun keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyikapi kebijakan pemerintah (*macro-policy and mes-policy*) yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha tani tembakau dan IHT;
 - j. membangun sistem informasi pertembakauan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *deeplearning* dan *big data*;
 - k. mendorong pemberdayaan pusat riset dan pengembangan teknologi pertembakauan;
 - l. mendorong alokasi penggunaan DBHCHT untuk perlindungan dan pengembangan Pertembakauan;
 - m. memberikan perlindungan, pemberdayaan dan kesejahteraan Petani Tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok; dan
 - n. membentuk Forum Kerja Sama Daerah Penghasil Tembakau dan Industri Hasil Tembakau.
- (2) Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam bentuk tujuan, sasaran, dan strategi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan arah kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilakukan pemetaan program/kegiatan/sub-kegiatan dan sumber pendanaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Biro yang memiliki tugas dan fungsi di bidang/terkait Pertembakauan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pemetaan program/kegiatan/sub-kegiatan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pengaturan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan Jawa Timur ini, dapat digunakan sebagai pedoman pengaturan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan di Jawa Timur dapat bersumber dari:

- a. APBD Provinsi;
- b. PDRD Provinsi;
- c. DBHCHT Provinsi; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
 PENGEMBANGAN PERTEMBAKAUAN TAHUN 2022-2024

ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PERTEMBAKAUAN
 TAHUN 2022-2024

I. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
A.	<p>Melestarikan budi daya tembakau dan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, serta mengembangkan IHT berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan dan menjaga nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal masyarakat</p> <p>1. Membangun komitmen petani, dan pelaku usaha untuk melestarikan budi daya tembakau, memroses menjadi rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia,</p> <p>2. Mengembangkan Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis tembakau dan sumber daya lokal</p> <p>3. Mengembangkan diversifikasi</p>	<p>1. Daya saing komoditas tembakau meningkat</p> <p>2. Keberlanjutan nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal pertembakauan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia</p> <p>3. Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis tembakau dan sumberdaya lokal berkembang</p>	<p>1. Penyuluhan usaha tani secara intensifikasi: menggunakan benih unggul, pemupukan dan pemeliharaan tanaman; penerapan budidaya efektif dan efisien, teknik petik dan penanganan daun tembakau, pengolahan, kendali mutu untuk menaikkan posisi tawar tembakau petani</p> <p>2. Demoplot budidaya tembakau dengan penerapan GAP (<i>Good Agricultural Practices</i>)</p> <p>3. Pelatihan bagi petani, Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan kelembagaan</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>4. produk IHT untuk memelihara kesetiaan konsumen rokok kretek (<i>consumers loyalty</i>), mengatasi substitusi rokok kretek menjadi rokok putih, nicotin cair, wave.</p> <p>5. Memberikan pendidikan dan latihan manajemen usaha tani (POAC): budidaya efektif dan efisien, petik dan pengolahan, kendali mutu untuk menaikkan posisi tawar tembakau petani.</p>	<p>4. Diversifikasi produk IHT berkembang dengan nilai tambah yang menguntungkan bagi petani</p> <p>5. Peningkatan pendidikan dan latihan manajemen usaha tani (POAC) dalam budidaya efektif dan efisien, petik dan pengolahan, kendali mutu untuk menaikkan posisi tawar tembakau petani</p>	<p>tentang budidaya tembakau dengan penerapan TQC/M (<i>Total Quality Control/ Management</i>)</p> <p>4. Pembinaan pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis tembakau dan sumberdaya lokal</p> <p>5. Pembinaan pengembangan diversifikasi produk IHT untuk memelihara kesetiaan: (a) konsumen rokok kretek (<i>consumers loyalty</i>), dan (b) mengatasi substitusi rokok kretek menjadi rokok putih, nikotin cair, wave dan sebagainya.</p>
B.	Meningkatkan produksi dan produktivitas, serta kualitas tembakau sebagai substitusi tembakau impor		
	<p>1. Meningkatkan produksi, dan produktivitas tembakau</p> <p>2. Meningkatkan mutu hasil tembakau sesuai kebutuhan IHT</p> <p>3. Mensubstitusi tembakau impor tembakau dengan tembakau dalam negeri</p>	<p>1. Produktivitas tembakau lebih 2 ton/ha</p> <p>2. Mutu tembakau produksi dalam negeri setara dengan mutu tembakau impor</p> <p>3. Impor tembakau berkurang</p>	<p>1. Ekstensifikasi areal tanam tembakau berbasis pemetaan kesesuaian lahan di sentra produksi historis dan di daerah pengembangan.</p> <p>2. Intensifikasi budidaya tembakau dengan Penerapan Budidaya Tepat (<i>Good Agricultural Practices</i>) yang berbasis inovasi teknologi budidaya yang berorientasi smart farming.</p> <p>3. Penetapan kebijakan pengendalian dan substitusi impor tembakau</p> <p>4. Kebijakan subsidi pemerintah: bantuan benih, modal pinjaman, ketersediaan pupuk, harga tembakau, tata niaga tembakau</p> <p>5. Penguatan posisi tawar petani melalui pemberdayaan kelembagaan petani tembakau: kemitraan dengan</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			<p>pabrikan (Poktan dan Gapoktan); menguatkan Asosiasi Petani Tembakau</p> <p>6. Pengembangan diversifikasi produk IHT, hilirisasi (R&D) berbasis tembakau berskala usaha kecil dan menengah (berbasis Poktan dan Gapoktan); maupun berkala usaha besar rokok (kretek, putih, nikotin cair, elektrik, cerutu); farmasi, kosmetik, biopestisida, biopestisida dan minyak atsiri</p> <p>7. Pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis sumberdaya lokal yang mampu mengaktualisasikan, menjaga nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia (RT)</p> <p>8. Kebijakan insentif bagi industri hasil tembakau (IHT) non rokok: untuk menarik bagi investor</p> <p>9. Peningkatan ekspor tembakau, rokok dan cerutu untuk meningkatkan devisa, diharapkan menekan beban cukai rokok.</p>
C.	<p>Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Petani Tembakau, IHT, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjaga keberlanjutan usaha tani tembakau dan IHT di Indonesia dalam bentuk kemitraan</p> <p>1. Membangun pola kemitraan dengan sinergi dan komitmen yang kuat antara petani tembakau dengan industri hasil tembakau (IHT),</p> <p>2. Meningkatkan peran atau keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam</p>	<p>1. Pola kemitraan yang saling menguntungkan secara adil dan bertanggung jawab didasari komitmen saling membutuhkan dan menguntungkan.</p> <p>2. Tumbuhnya kekuatan, eksistensi, dan keberlanjutan</p>	<p>1. Membangun kelembagaan petani berbasis kearifan lokal (local wisdom): sosial engineering, partnership, corpopreneurship,</p> <p>2. Pendidikan SDM sebagai kader Poktan/Gapoktan</p> <p>3. Pendidikan kader Koperasi dalam penggunaan dan pemasaran tembakau berbasis IT, kendali mutu tembakau dan olahan IHT</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>membangun kekuatan, eksistensi, dan keberlanjutan usaha tani tembakau dan IHT di Indonesia</p> <p>3. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan petani dan IHT melalui kemitraan yang diatur dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah</p> <p>4. Mengembangkan kewirausahaan kelompok tani (Poktan, Gapoktan dan Kooperasi) untuk meningkatkan kemampuan memasarkan tembakau, meningkatkan nilai tambah, harga jual;</p> <p>5. Meningkatkan peran Koperasi petani tembakau sebagai eksportir dan importir</p>	<p>usaha tani tembakau dan IHT di perdesaan sesuai Undang-undang dan Peraturan Daerah</p> <p>3. Berkembangnya kewirausahaan petani berbasis Kelompok Tani melalui integrasi vertikal maupun horizontal</p> <p>4. Terwujudnya koperasi petani tembakau yang melayani kebutuhan saprodi dan modal usaha tani</p>	
D.	Meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh		
	<p>1. Meningkatkan produksi, dan produktivitas cengkeh</p> <p>2. Meningkatkan mutu hasil cengkeh</p> <p>3. Mengatasi maraknya impor cengkeh</p>	<p>1. Peningkatan produksi, dan produktivitas cengkeh</p> <p>2. Peningkatan mutu hasil cengkeh</p> <p>3. Kemandirian penyediaan (penawaran) cengkeh domestik</p>	<p>1. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh nasional, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh.</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			2. Dukungan kebijakan pemerintah dalam penyediaan bantuan benih, modal pinjaman, ketersediaan pupuk, tataniaga cengkeh dan stabilitas harga cengkeh 3. Peremajaan tanaman cengkeh
E.	Mempertahankan karakteristik khas dan kemurnian varietas tembakau (indikasi geografis) melalui penerapan inovasi dan teknologi serta penetapan regulasi tata niaga		
	1. Melegalkan/merilis varietas unggul lokal 2. Melindungi produk hasil tembakau yang spesifik karena kekhasan geografis sebagai produk Perlindungan Indikasi Geografis.	1. Varietas unggul baru tembakau 2. Perlindungan Indikasi Geografis untuk produk tembakau yang spesifik dan bernilai tinggi	1. Eksplorasi, diskripsi dan uji multilokasi galur-galur harapan tembakau. 2. Perakitan varietas unggul tembakau 3. Identifikasi kekhasan produk tembakau lokal untuk Perlindungan Indikasi Geografis.
F.	Menyusun peta jalan (road map) dan rencana strategis pertembakauan yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global		
	1. Memberikan arah pengembangan dan perlindungan pertembakauan Jawa Timur; 2. Menjadi standar acuan pengembangan dan perlindungan pertembakauan Jawa Timur; 3. Memberikan arah capaian dan tahapan pengembangan dan perlindungan pertembakauan Jawa Timur. 4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi capaian kinerja dan output pengembangan dan	1. Kebijakan dalam bentuk road map di payungi regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur; 2. Sasaran dari road map ini adalah: a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui OPD terkait; b. IHT di Jawa Timur; dan c. Petani Tembakau dan Cengkeh Jawa Timur.	1. Melakukan evaluasi Road Map Pengusahaan Tembakau Jawa Timur 2012-2022; 2. Melakukan Revisi atau Penyusunan Baru Peta Jalan (<i>road map</i>) 2020-2030; 3. Membentuk Tim Penyusunan Road Map Pertembakauan Jawa Timur. 4. Mensosialisasikan Roadmap Pertembakauan yang telah tersusun.

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	perlindungan pertembakauan Jawa Timur.	3. Menjadi acuan semua pihak (<i>stakeholders</i>) yang bergerak di bidang pertembakauan.	
G.	<p>Mengembangkan, memanfaatkan, dan mempublikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif paparan asap rokok terhadap kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem penelitian terintegrasi dengan melibatkan jejaring kerja lembaga-lembaga penelitian 2. Meningkatkan publikasi pertembakauan 3. Mendorong IHT untuk pengembangan penelitian yang difokuskan untuk mengatasi dampak negatif produk IHT bidang kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penelitian pertembakauan yang terintegrasi 2. Peningkatan publikasi pertembakauan 3. Pengembangan penelitian pengendalian dampak negatif produk IHT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pusat penelitian tembakau 2. Mengembangkan pusat informasi pertembakauan. 3. Peningkatan penelitian pengendalian dampak negatif produk IHT
H.	<p>Menginventarisasi dan mengevaluasi regulasi yang menghambat keberlangsungan budi daya tembakau dan IHT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dasar kebijakan dalam bertindak dalam pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan IHT dan Petani pertembakauan Jawa Timur. 2. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan, perlindungan dan pemberdayaan IHT dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalisasi regulasi penghambat keberlangsungan usaha tani tembakau dan IHT 2. Peningkatan peran pertembakauan dalam aspek ekonomi dan sosial 3. Keberlanjutan usaha tani tembakau dan IHT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi, mengevaluasi, dan merevisi regulasi yang menghambat keberlangsungan usaha tani tembakau 2. Penelitian yang berfokus pada regulasi pertembakauan yang berimbang dalam mengatur kepentingan aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>Petani Pertembakauan Jawa Timur;</p> <p>3. Sebagai instrumen, kontrol dan evaluasi capaian kinerja dan output pengembangan, perlindungan dan pemberdayaan IHT dan Petani pertembakauan Jawa Timur.</p>		
I.	<p>Membangun keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyikapi kebijakan pemerintah (<i>macro-policy and meso-policy</i>) yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha tani tembakau dan IHT</p> <p>Menciptakan dan menyelaraskan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menyikapi kebijakan pemerintah (<i>macro-policy and meso-policy</i>) yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap keragaan usaha tani tembakau dan IHT (<i>micro-policy</i>).</p>	<p>1. Soliditas sikap seluruh pemangku kepentingan pertembakauan Jawa Timur terhadap kebijakan pertembakauan yang diambil oleh pemerintah pusat, antara lain kebijakan & tarif cukai hasil tembakau, importasi tembakau, dan penataan industri hasil tembakau.</p> <p>2. Program pembangunan Jawa Timur (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) yang partisipatif dan efektif terhadap perlindungan dan pengembangan pertembakauan.</p>	<p>1. Membentuk Forum Komunikasi Pertembakauan Jawa Timur</p> <p>2. Melaksanakan pertemuan pemangku kepentingan pertembakauan di Jawa Timur dalam rangka pengusulan dan/atau penyikapan kebijakan pertembakauan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p> <p>3. Melaksanakan musrenbang tematik pertembakauan yang melibatkan Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan pemangku kepentingan pertembakauan lainnya</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
J.	<p>Membangun sistem informasi pertembakauan dengan memanfaatkan teknologi berbasis deeplearning dan big data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh sistem informasi pertembakauan Jawa Timur yang terintegrasi antar pemangku kepentingan; 2. Menata Tata Niaga Pertembakauan Jawa Timur, yang transparan dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat; 2. Sistem tata niaga pertembakauan Jawa Timur yang menjamin keberlangsungan IHT, pedagang tembakau/cengkeh dan petani tembakau. 3. Informasi Pertembakauan yang valid dan mudah diakses. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan dan identifikasi sistem tata niaga pertembakauan; 2. Merancang <i>pilot project</i> sistem informasi yang akanditerapkan; 3. Pengadaan sarana-prasaran untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan informasi tata niaga pertembakauan Jawa Timur; 4. Pengembangan dan pengintegrasian sisten Tata Niaga Pertembakauan Jawa Timur. 5. Uji coba dan evaluasi Sistem informasi Tata Niaga Pertembakauan Jawa Timur.
K.	<p>Mendorong pemberdayaan pusat riset dan pengembangan teknologi pertembakauan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran pusat riset sebagai lembaga penghasil inovasi teknologi pertembakauan. 2. Menghasilkan inovasi teknologi yang mendorong diversifikasi produk selain rokok dengan bahan baku tembakau. 3. Menyediakan data dan infomasi yang akurat tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Riset yang semakin produktif dan inovatif yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku; 2. Diversifikasi produk selain rokok dengan bahan baku tembakau. 3. Tersedianya data dan infomasi yang akurat tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghidupkan dan membangun kembali pusat-pusat riset pertembakauan di Jawa Timur. 2. Mendorong Perguruan Tinggi yang berbasis Pertanian untuk mengembangkan penelitian di bidang pertembakauan dengan disediakannya funding dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten). 3. Mendorong peran serta industri untuk mengembangkan riset produk, kualitas bahan baku, dan dampak sosial-ekonomi terhadap keberadaan IHT.

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>pertembakauan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat</p>	<p>pertembakauan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.</p>	
L.	<p>Mendorong alokasi penggunaan DBHCHT untuk perlindungan dan pengembangan Pertembakauan</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyederhanakan penggolongan tarif cukai hasil tembakau 2. Optimalisasi penggunaan dana DBHCHT dalam rangka penguatan pertembakauan Jawa Timur dan nasional. 3. Penerapan tarif yang proporsional pada produk IHT: agar tetap bergairah dan tetap ada alternatif sumber penerimaan pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi DBHCHT untuk peningkatan jumlah dan kualitas bahan baku tembakau 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya tembakau 3. Penyediaan akses permodalan bagi petani tembakau, 4. Penguatan kelembagaan petani, 5. Revitalisasi keberlangsungan IHT dengan tetap mempertimbangkan potensi produksi dan karakteristik masing-masing daerah; 6. Peningkatan alokasi DBHCHT untuk pemberantasan rokok ilegal; 7. Pengalokasian DBHCHT untuk pengembangan budidaya cengkeh sebagai bahan baku IHT; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi aturan penggunaan DBHCHT yang lebih berpihak kepada peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku serta pemberantasan rokok ilegal. 2. Menetapkan alokasi DBHCHT untuk kesehatan secara proporsional. 3. Memberdayakan koperasi tani untuk penyediaan benih, pupuk dan peralatan mesin pertanian untuk budidaya tembakau

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>8. Perubahan alokasi DBHCHT untuk bidang kesehatan dari minimal 50 persen menjadi maksimal 50 persen;</p> <p>9. Besaran penggunaan DBHCHT agar tidak dijadikan pertimbangan untuk mengurangi program prioritas yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibiayai oleh sumber pembiayaan selain DBHCHT.</p>	
M.	<p>Memberikan perlindungan, pemberdayaan dan kesejahteraan Petani Tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan terhadap petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok. 2. Memberdayakan petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok dalam menjalankan kegiatannya. 3. Mewujudkan kesejahteraan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok. 	<p>1. Perlindungan terhadap petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok melalui pemberian bantuan langsung tunai, jaminan perlindungan produk tembakau, subsidi harga tembakau, bantuan modal usaha, pemberian bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi.</p>	<p>1. Melakukan pelatihan peningkatan kualitas bahan baku.</p> <p>2. Melakukan penanganan panen dan pasca panen.</p> <p>3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.</p> <p>4. Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.</p> <p>5. Memberikan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.</p> <p>6. Memberikan subsidi harga tembakau.</p> <p>7. Melakukan pelatihan ketrampilan kerja kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok.</p> <p>8. Memberikan bantuan modal usaha kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha.</p>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>2. Peningkatan kualitas bahan baku, dukungan sarana dan prasarana, penanganan panen dan pasca panen.</p> <p>3. Peningkatan kualitas petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok melalui pelatihan ketrampilan kerja.</p>	<p>9. Memberikan bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.</p>
N.	Membentuk Forum Kerja Sama Daerah Penghasil Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (FK DPT-IHT)		
	<p>1. Membentuk FK DPT-IHT.</p> <p>2. Memperlancar komunikasi, meningkatkan koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan.</p>	<p>Terbentuknya Forum Pertembakauan berbasis misi keberlangsungan pertembakauan yang mandiri dan berdaya saing tinggi</p>	<p>1. Menyamakan persepsi tentang strategisnya Pertembakauan di Jawa Timur khususnya dan Nasional pada umumnya.</p> <p>2. Membentuk Forum Pertembakauan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi semua pemangku kepentingan pertembakauan.</p>

II. PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

Arah Kebijakan 1: Melestarikan budi daya tembakau dan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, serta mengembangkan IHT berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan dan menjaga nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal masyarakat

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Penyuluhan usaha tani secara intensifikasi: menggunakan bibit unggul, pemupukan dan pemeliharaan tanaman; penerapan budidaya efektif dan efisien, teknik petik dan penanganan daun tembakau, pengolahan, kendali mutu untuk meningkatkan posisi tawar tembakau petani	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2	Demoplot budidaya tembakau dengan penerapan GAP (Good Agricultural Practices)	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
3	Pelatihan bagi petani, Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan kelembagaan tentang budidaya tembakau dengan penerapan TQC/M (Total Quality Control/ Management)	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

					Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
4	Pembinaan pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis tembakau dan sumberdaya lokal	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.02 Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

			Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.1.02.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

				Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
5	Pembinaan pengembangan diversifikasi produk IHT untuk memelihara kesetiaan: (a) konsumen rokok kretek (consumers loyalty), dan (b) mengatasi substitusi rokok kretek menjadi rokok putih, nikotin cair, wave dan sebagainya	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan produksi dan produktivitas, serta kualitas tembakau sebagai substitusi tembakau impor.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Pemetaan daerah historis pernah berhasil dalam budidaya tembakau jenis tertentu	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2	Pemetaan daerah yang memiliki potensi pengembangan tembakau sesuai permintaan pasar	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
3.	Penerapan inovasi teknologi budidaya tembakau atau intensifikasi usaha tani tembakau (unggul lokal, indikasi geografis, atas dasar permintaan pasar): penyediaan bibit unggul, pupuk, dan penyuluhan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.05.1.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.05.1.01.04 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
4.	Ekstensifikasi atau perluasan area usaha tani tembakau (unggul lokal, indikasi geografis, atas dasar permintaan pasar): penyediaan bibit, pupuk, penyuluhan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

				3.27.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

5.	Modernisasi budidaya dan pengolahan IHT	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
6.	Menggalakkan kebijakan substitusi impor tembakau: meningkatkan kesejahteraan petani	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pelaksanaan Pemasaran	3.30.07.1.02.01	3.30.07.2.02.02	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

			Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
7.	Kebijakan subsidi pemerintah: bantuan bibit, modal pinjaman, ketersediaan pupuk, harga tembakau, tata niaga tembakau	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

				3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
8.	Penguatan posisi tawar petani melalui pemberdayaan kelembagaan petani tembakau: kemitraan dengan pabrikan (Poktan dan Gapoktan); menguatkan Asosiasi Petani Tembakau	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
9.	Pengembangan diversifikasi produk IHT, hilirisasi (R&D) berbasis tembakau berskala usaha kecil dan menengah (berbasis Poktan dan Gapoktan); maupun berkala usaha besar rokok (kretek, putih, nikotin cair, elektrik, cerutu); farmasi, kosmetik, biopestisida, biopestisida dan minyak atsiri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang angguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pergentasan Kemiskinan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan				

			Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
10.	Pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT) berbasis sumberdaya lokal yang mampu mengaktualisasikan, menjaga nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia (RT)	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
11.	Kebijakan insentif bagi industri hasil tembakau (IHT) non rokok: agar menarik bagi investor	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.02 Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

				Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
				3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian			3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
3.30.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi			3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi			3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	

		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

			3. 30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.1.02.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

12.	Peningkatan ekspor tembakau, rokok dan cerutu untuk meningkatkan devisa, diharapkan menekan beban cukai rokok	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.02 Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 3: Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Petani Tembakau, IHT, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjaga keberlanjutan usaha tani tembakau dan IHT di Indonesia dalam bentuk kemitraan

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Membangun kelembagaan petani berbasis kearifan lokal (<i>local wisdom</i>): sosial engineering, partnership, corporepreneurship,	c	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2.	Pendidikan SDM sebagai kader Poktan/Gapoktan	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

3.	Pendidikan kader Koperasi dalam penggunaan dan pemasaran tembakau berbasis IT, kendali mutu tembakau dan olahan IHT	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

Arah Kebijakan 4: Meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh nasional, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2.	Dukungan kebijakan pemerintah dalam penyediaan bantuan bibit, modal pinjaman, ketersediaan pupuk, tataniaga cengkeh dan stabilitas harga cengkeh	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas	3.27.07.1.03.01	3.27.07.2.01.02	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

			Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3.	Peremajaan tanaman cengkeh	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 5: Mempertahankan karakteristik khas dan kemurnian varietas tembakau (indikasi geografis) melalui penerapan inovasi dan teknologi serta penetapan regulasi tata niaga.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SUMBER DANA	
				Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020			
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		
1	Melakukan uji dan pengawasan peredaran tembakau dengan spesifikasi Indikasi Geografis tertentu: tembakau unggul lokal Madura, Besuki NO/VO, Lumajang	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01	3.27.02.2.02.01	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.02.2.02.02		
					3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
			3.27.02.1.02.04	3.27.02.2.01.01	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
	3.27.03.2.01.03	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						
	3.27.02.1.03.02	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain					
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Penilaian Kultivar Tumbuhan dan Mikroorganisme		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
	3.27.02.1.03.04	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain					
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Tumbuhan dan Mikroorganisme		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			

2.	Melakukan uji dan pengawasan peredaran tembakau berdasarkan kekhasan dan kemurnian varietas tembakau daerah tertentu (indikasi geografis) melalui penerapan inovasi dan teknologi serta penetapan regulasi tata niaga.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.02 Penilaian Kultivar Tumbuhan dan Mikroorganisme	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.02.1.03.04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Tumbuhan dan Mikroorganisme	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 6: Menyusun peta jalan (road map) dan rencana strategis pertembakauan yang berbasis kesejahteraan petani dan pasar global.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SUMBER DANA
				Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Membentuk Tim Penyusunan Road Map Pertembakauan Jawa Timur, serta melakukan evaluasi Road Map Pengusahaan Tembakau Jawa Timur 2012-2022	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
2.	Melakukan Revisi atau Penyusunan Baru Peta Jalan (road map) 2020-2030	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3.	Mensosialisasikan Roadmap Pertembakauan yang telah tersusun	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 7: Mengembangkan, memanfaatkan, dan mempublikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif paparan asap rokok terhadap kesehatan.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	<p>Memperoleh teknologi yang dapat merubah karakter asap rokok agar lebih rujuk dengan fisiologi manusia</p> <p>Riset ilmiah merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertembakauan. Selama ini paparan asap rokok menunjukkan bukti ilmiah yang memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan. Pada dasarnya pemahaman ilmiah tentang dampak IHT dan rokok di atas dibangun dari pendekatan penelitian analitik dan corak metode reduksionistik. Untuk ini, kajian yang selama ini ada perlu dilengkapi dengan upaya memahami sifat asap rokok secara lebih komprehensif. Ide ini selaras dengan kenyataan bahwa asap rokok juga memiliki banyak manfaat dan bahkan di masa lalu tembakau dianggap sebagai herbal yang bermanfaat untuk kesehatan, bahkan sering asap rokok dipakai untuk pengobatan sakit perut dengan memasukkan asap secara enema.</p> <p>Mengingat besarnya peran Industri Hasil Tembakau dalam perekonomian nasional serta banyaknya orang yang menggantungkan kehidupannya dari bisnis pertembakauan pemikiran untuk mendayagunakan sisi positif dan mengurangi dampak asap rokok perlu dilakukan. Metodologi yang saat ini sering dipakai dalam kajian-kajian dampak IHT terhadap perekonomian,</p>	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		

<p>sosial dan politik serta dampak asap rokok terhadap kesehatan perlu diperlengkapi dengan teknik metodologi kajian yang bersifat lebih holistik atau komprehensif.</p> <p>Riset ilmiah merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertembakauan. Selama ini paparan asap rokok menunjukkan bukti ilmiah yang memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan. Pada dasarnya pemahaman ilmiah tentang dampak IHT dan rokok di atas dibangun dari pendekatan penelitian analitik dan corak metode reduksionistik. Untuk ini, kajian yang selama ini ada perlu diperlengkapi dengan upaya memahami sifat asap rokok secara lebih komprehensif. Ide ini selaras dengan kenyataan bahwa asap rokok juga memiliki banyak manfaat dan bahkan di masa lalu tembakau dianggap sebagai herbal yang bermanfaat untuk kesehatan, bahkan sering asap rokok dipakai untuk pengobatan sakit perut dengan memasukkan asap secara enema.</p> <p>Mengingat besarnya peran Industri Hasil Tembakau dalam perekonomian nasional serta banyaknya orang yang menggantungkan kehidupannya dari bisnis pertembakauan pemikiran untuk mendayagunakan sisi positif dan mengurangi dampak asap rokok perlu dilakukan. Metodologi yang saat ini sering dipakai dalam kajian-kajian dampak IHT terhadap perekonomian, sosial dan politik serta dampak asap rokok terhadap kesehatan perlu diperlengkapi dengan teknik</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>metodologi kajian yang bersifat lebih holistik atau komprehensif.</p> <p>Untuk memperoleh teknologi yang dapat merubah karakter asap rokok agar lebih rujuk dengan fisiologi manusia dan tidak dengan cara mengurangi kandungan komponennya, tidak mungkin dilakukan melalui kajian analitik-reduksionistik seperti yang selama ini banyak dilakukan. Kajian yang lebih holistik dimungkinkan dengan perkembangan ilmu material berbasis konsep Nano Sciene. Bahasan-bahasan yang dipakai melibatkan pemikiran fisika modern yang ditopang dengan kemajuan dalam bidang ilmu komputer sistem cerdas, yang terkoneksi internet dengan integrasi di pusat-pusat data dunia yang memanfaatkan sistem awan telah tumbuh menjadi bidang ilmu baru yaitu data science.</p> <p>Dengan data Science sangat memungkinkan adanya pengembangan konsep holistik dengan dukungan analisis Big Data. Kajian dengan pendekatan holistik atau lebih komprehensif ini disebut pendekatan Complexity Science. yang akan membuka peluang untuk membangun konsep baru yang lebih menggambarkan situasi nyata dengan data valid dan real time tentang dampak IHT dan asap rokok di masyarakat. Pendekatan complexity Science ini akan memberikan gambaran yang tidak lagi parsialistik.</p> <p>Pendekatan riset di atas merupakan hal baru, dan untuk dapat meyakinkan publik yang selama ini berpikir negatif</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>terhadap IHT, maka perlu adanya sinergitas berbagai pihak pemangku kepentingan. Kajian-kajian dampak IHT terhadap sistem perekonomian, sosial dan politik serta dampak asap rokok terhadap kesehatan dapat ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi berbasis internet dan komputer sistem cerdas. Pengambil kebijakan juga dapat membuat keputusan akurat karena data yang dipakai tidak hanya valid namun juga "real time". Dari sisi ilmu material juga tidak tertutup kemungkinan untuk dapat merubah sifat asap rokok ke arah yang lebih rujuk dengan sistem fisiologi manusia.</p>					
--	--	--	--	--	--

Arah Kebijakan 8: Menginventarisasi dan mengevaluasi regulasi yang menghambat keberlangsungan budi daya tembakau dan IHT

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SUMBER DANA
				Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Penyusunan Baru Peta Jalan (road map) 2020-2030	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
2	Sosialisasi Roadmap Pertembakauan yang telah tersusun	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3	Pembinaan dan supervisi pada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan road map sesuai peraturan perundang-undangan	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

				3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 9: Membangun keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyikapi kebijakan pemerintah (macro-policy and mes-policy) yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha tani tembakau dan IHT.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA		
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			
1.	Menyusun payung regulasi kebijakan pertembakauan yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan OPD terkait dengan stakeholder maupun stockholder bisnis pertembakauan	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		
2.	Menyusun regulasi penetapan tarif cukai yang optimal	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		
3.	Menetapkan SOP perijinan importasi tembakau untuk berhasilnya kebijakan import substitution	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		
				3.27.06.1.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		
						3.27.06.1.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
								3.27.06.1.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
4.	Menetapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi tembakau domestik dan diversifikasi produk hasil tembakau	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain		

		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 10: Membangun sistem informasi pertembakauan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *deeplearning* dan *big data*.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SUMBER DANA
				Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Melakukan pemetaan dan identifikasi sistem tata niaga pertembakauan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	
		Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
2.	Merancang pilot project sistem informasi yang akan diterapkan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	
		Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3.	Pengadaan sarana-prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan informasi tata niaga pertembakauan JawaTimur	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana,	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

					Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
				3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
4.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem Tata Niaga Pertembakauan JawaTimur	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.02 Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.02.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			3.30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.1.02.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
	3.31.02.1.01.03			3.31.02.2.01.03	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
5.	Uji coba dan evaluasi Sistem informasi Tata Niaga Pertembakauan Jawa Timur	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3. .30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.1.02.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 11: Mendorong pemberdayaan pusat riset dan pengembangan teknologi pertembakauan.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA	
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		
1	Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengolahan minyak atsiri dari tembakau	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
2.	Mendidik kewirausahaan pengolahan tembakau non rokok	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
					3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
			3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani		3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	
			3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani		3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain	

				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
3.	Melatih sistem pemasaran global melalui online	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.03.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.30.07.1.02.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 12: Mendorong alokasi penggunaan DBHCHT untuk perlindungan dan pengembangan Pertembakauan.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Merevisi aturan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka penguatan pertembakauan nasional.	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2.	Memberdayakan koperasi tani untuk penyediaan bibit, pupuk dan peralatan mesin pertanian untuk budidaya tembakau	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 13: Memberikan perlindungan, pemberdayaan dan kesejahteraan Petani Tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SUMBER DANA
				Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Melakukan pelatihan peningkatan kualitas bahan baku.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
2.	Melakukan penanganan panen dan pasca panen	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyediaan dan Pengembangan	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana,	3.27.03.2.01.03	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

		Prasarana Pertanian		Kawasan dan Komoditas Pertanian	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	
				3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3.	Memberikan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.03.1.01.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
4.	Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Tani	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

	Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok		Sumber Daya Alam	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
5.	Memberikan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
6.	Memberikan subsidi harga tembakau	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
7.	Melakukan pelatihan ketrampilan kerja kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
8.	Memberikan bantuan modal usaha kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

9.	Memberikan bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

Arah Kebijakan 14: Membentuk Forum Kerja Sama Daerah Penghasil Tembakau dan Industri Hasil Tembakau.

NO.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN Kepmendagri 050/-3708 Tahun 2020		SUMBER DANA
				PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Memperkuat organisasi bisnis berbasis petani (Poktan/Gapoktan)	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
2.	Memperkuat jejaring kemitraan yang adil dan bertanggung jawab antara petani dengan IHT	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	APBN/PDRD/DBHCHT/ APBD/Sumber Lain

				Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
3.	Memperkuat hubungan berbagai pemangku kebijakan: pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan akademisi	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
4.	Melaksanakan pendidikan dan latihan memahami kualitas dan mengawal TQM (total quality managemen) secara “tangung renteng”, saling menjaga dan mengawasi	Penyuluh Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	3.27.07.2.01.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
					3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.02 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	3.27.07.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain
				3.27.07.1.03.04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBN/PDRD/DBHCHT/APBD/Sumber Lain

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA